



# **SISTEM PEMERINTAHAN ELEKTRONIK**



MODUL - Sesi 4

## **Visi dan Strategi E-Government**

M Hanif Jusuf ST MKOM

**2022**



## Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>PERTEMUAN 4 Visi dan Strategi E-Government</b> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>117</b>

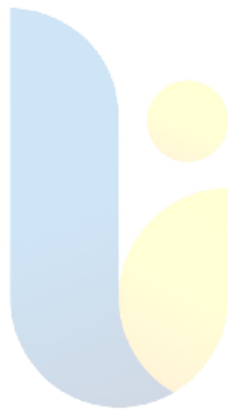


UNIVERSITAS  
INABA



## DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

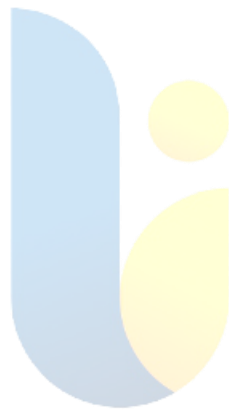


UNIVERSITAS  
INABA



## DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.

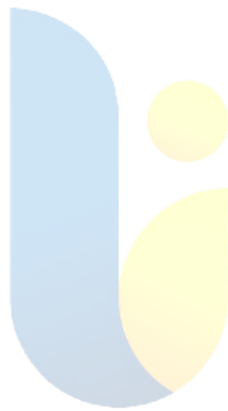


UNIVERSITAS  
INABA



## DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

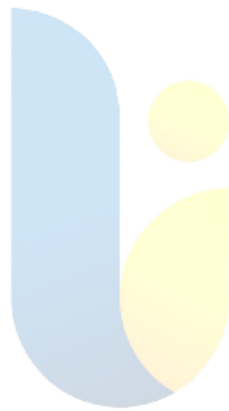


UNIVERSITAS  
INABA



## DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.



UNIVERSITAS  
INABA



## PERTEMUAN 4

### Visi dan Strategi E-Government

Kemampuan yang diharapkan (Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah / Sub-CPMK):

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi Teknologi dan Informasi
2. Mahasiswa mampu memahami manfaat komputer
3. Mahasiswa mampu memahami proses dalam perencanaan strategis E-Government
4. Mahasiswa mampu mengerti alur dari pembuatan perencanaan strategis
5. Mahasiswa mendapatkan gambaran arah pengembangan E-Government dengan melihat *real case study* negara yang sudah menerapkannya

#### Slide – page 1

Di sesi ini, kita akan membahas tentang visi dan strategi *e-government*. Di sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang strategi, visi, *roadmap* dan inisiatif dari *e-government*.

Apa yang akan kita bicarakan disini adalah proses perencanaan strategis *e-government*. Salah satu faktor sukses dari *e-government* yang telah kita diskusikan adalah perlunya visi, strategi dan *roadmap* yang jelas. Hal inilah yang akan kita diskusikan.

Pada materi ini akan banyak mengambil real case study apa yang dilakukan oleh Korea untuk menerapkan E-Government di Negeranya

#### Slide – page 2

Dalam merumuskan perencanaan strategis maka kita harus berangkat dari visi yang dimiliki oleh organisasi. Karena E-gov konteks nya adalah Negara maka ini harus mengacu kepada Visi dari Negara.

Turunan dari Visi menuju ke goal formulation kemudian ke strategy development, objective formulation sampai dengan review harus berjalan selaras. Tujuannya agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan Visi dari Negara. Tidak boleh ada penyimpangan di luar hal tersebut. Karena jika terjadi penyimpangan maka dapat dipastikan visi yang ada pada Negara tidak dapat di realisasi.

Salah satu bagian dari perencanaan strategi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah tentang *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Dengan analisis SWOT, anda perlu melihat situasi saat ini dan menentukan strategi. Berdasarkan visi, tujuan, strategi, dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Anda perlu meninjau dan mengevaluasi dari proses. Terdapat lima langkah dalam melakukan perencanaan strategis.

### Slide – page 3

Strategi yang baik sangat penting bagi implementasi *e-government* yang efektif. Strategi memberikan *roadmap* transformasi sistem pemerintahan. Ketika anda memberikan kuliah atau seminar dalam *e-government*, anda perlu menekankan hal ini. Anda perlu dorong mereka untuk menyusun *roadmap e-government*. *Roadmap* menjadi panduan untuk bergerak dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan dalam jangka menengah atau panjang.

### Slide – page 4

Langkah pertama perencanaan strategis adalah menganalisis keadaan saat ini dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi e-government saat ini.

Langkah kedua adalah menentukan visi. Visi harus datang dari pimpinan pemerintah atau pimpinan komite implementasi *e-government*. Sebagai contoh, visi *e-government* Korea adalah untuk menjadi “*open e-government* terbaik di dunia” Mereka ingin meningkatkan layanan publik online hingga 85%. Mereka berusaha menjadi 10 besar dunia dalam hal daya saing dukungan bisnis. Visi adalah sebuah pernyataan yang bersifat umum.

Sesudah visi ditetapkan, anda bisa mewujudkan visi tersebut dalam tujuan-tujuan. Sebagai contoh, tujuan nasional dari Republik Korea adalah untuk membangun demokrasi bersama rakyat; membangun masyarakat dengan pertumbuhan sosial yang seimbang; berkontribusi terhadap era perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut; dan untuk mencapai pendapatan per kapita hingga US\$20.000. Perlu diperhatikan disini bahwa tujuan harus merupakan perwujudan dari visi yang ada.

### Slide – page 5





Tujuan harus spesifik dan rinci. Tujuan *e-government* dari Republik Korea adalah, untuk menginovasi cara kerja pemerintah; menginovasi layanan masyarakat; menginovasi manajemen sumber daya informasi; dan mereformasi sistem hukum.

Setelah anda menetapkan visi dan tujuan, anda perlu menentukan strategi untuk mengatasi temuan dari hasil analisis SWOT dan mencapai tujuan-tujuan spesifik. Apa itu strategi? “Cara kita melakukan sesuatu”, “Cara mencapai tujuan”, “Sekumpulan aksi”, “Rencana dan aksi yang konkrit dan rinci”.

Setelah anda memiliki strategi, apa lagi yang anda butuhkan? Anda perlu memformulasikan objektif yang dapat diukur dan konkrit dari strategi yang ada. Objektif itu dapat diukur, sementara visi dan strategi tidak. Apakah contoh dari objektif? Misalnya kita ingin mencapai target tertentu pada tahun 2010. Target tersebut harus berdasarkan visi dan tujuan yang ada.

Langkah selanjutnya adalah mengomunikasikan dan melakukan peninjauan ulang rencana strategis. Kita telah menyusun rencana strategis, dan sekarang saatnya kembali memperbaikinya. Pastikan bahwa seluruh tujuan dan objektif yang ada konsisten.

#### Slide – page 6

Berikut adalah visi *roadmap e-government* Korea.

Di tahun 2003, setiap departemen telah memiliki sistem mereka sendiri, seperti sistem SDM, keuangan dan audit. Setiap departemen memiliki pulau tersendiri. Banyak negara masih memiliki *platform* seperti ini.

Di tahun 2007, pemerintah bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu sistem yang terintegrasi dan berbagi informasi. Mereka memiliki jalur kontak tunggal yang terintegrasi. Karena setiap departemen telah terintegrasi, berarti hanya ada satu sistem SDM, keuangan, dan audit dengan jaringan *e-government* dan lingkungan TI yang terintegrasi.



**Slide – page 7**

Berikut ini adalah tujuan *roadmap e-government*. Dalam konteks metode kerja, semua dokumen kertas berubah menjadi dokumen elektronik. Prosedur yang berorientasi departemen berubah menjadi prosedur berorientasi layanan.

Terkait layanan masyarakat – banyaknya jalur kontak, kunjungan dan pertemuan tatap muka berubah menjadi jalur kontak tunggal, tanpa kunjungan dan layanan online. Partisipasi yang tadinya terbatas pada polling ditingkatkan menjadi partisipasi secara elektronis.

**Slide – page 8**

Berikut adalah contoh inisiatif dan *roadmap* dari *e-government* Korea. Pemerintah Korea menetapkan *roadmap* yang rinci melalui proses perencanaan strategis yang mendalam, mencakup analisis SWOT, ISP (*Information Strategic Planning*), dan BPR (*Business Process Reengineering*). Informasi lebih rinci tentang perencanaan strategis informasi dapat Anda telusuri di Internet. ISP/BPR adalah metodologi utama yang digunakan dalam penyusunan *roadmap e-government* pemerintah Korea. Setiap proyek yang dilakukan pemerintah, harus melalui tahap ISP terlebih dahulu. Lima besar perusahaan konsultan dunia seperti BearingPoint dan Accenture memiliki metodologi mereka masing-masing dalam melakukan ISP.

*Roadmap* dari *e-government* dilaporkan dan dikonfirmasi oleh komite presidensial pada bulan Agustus. Visinya adalah “*Open e-government* terbaik di dunia”. Lalu pemerintah menetapkan rencana lima tahun dari 2003 hingga 2007. Rencana tersebut mencakup 4 area, 10 agenda, dan 31 kegiatan, yang merupakan *roadmap* spesifik yang ditetapkan melalui seluruh proses yang telah disebutkan.

**Slide – page 9**

Berikut adalah struktur organisasi implementasi *e-government* Korea. Diketaui oleh presiden, dan dibawah Presiden terdapat komite reformasi pemerintah, komite khusus *e-government*, dan dewan kabinet.

Termasuk dalam struktur organisasi adalah kementerian seperti misalnya Kementerian Informasi dan Komunikasi (MIC - *Ministry of Information and Communication*), Kementerian



Administrasi Pemerintah dan Urusan Dalam Negeri (MOGAHA - *Ministry of Government Administration and Home Affairs*).

Mereka semua bekerja sama untuk mendukung teknologi administrasi dengan *platform* umum. Seluruh proyek *e-government* ini diatur oleh NCA atau *National Computerization Agency* – Lembaga Komputerisasi Nasional. Setiap pemerintahan tentunya memiliki badan semacam Pusat Komputer Nasional, yang mengawasi seluruh aktivitas implementasi *e-government* termasuk *roadmap* dan rincian kegiatan. NCA sebenarnya merupakan bagian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, tetapi ditugaskan khusus untuk mengawasi dan mengatur seluruh proyek *e-government* yang ada.

#### Slide – page 10

Sebelum menetapkan rencana lima tahun dari 2003 hingga 2007, pengembangan *e-government* di Korea dimulai sejak tahun 1987. Fase pertama adalah penetapan Sistem Informasi Dasar Nasional. Pada tahun 1995, Rencana Induk TI Nasional ditetapkan, seperti telah disebutkan sebelumnya. Lalu pada tahun 2001, didirikan Komite Khusus untuk *e-government*.

#### Slide – page 11

Dan pada tahun 2003, rencana lima tahun ditetapkan. Keluarnya UU Promosi Informasi pada tahun 1995 juga penting, yang akhirnya mengawali semua proses ini. Anda bisa melihat bahwa sebelum tahun 2003, pemerintah telah melakukan banyak hal, yang menunjukkan bahwa *roadmap* dari *e-government* adalah memang perencanaan jangka panjang. Ini perlu dipahami dengan baik oleh para pejabat pemerintah.

#### Slide – page 12

Roadmap *e-government* Korea mencakup 4 bidang. Bidang pertama adalah G2G untuk reformasi proses internal pemerintah. Bidang kedua adalah G2C dan G2B untuk reformasi layanan publik. Bidang ketiga adalah pengembangan *platform* umum, dan bidang keempat adalah reformasi aturan hukum.

Berikut adalah 10 agenda dalam 4 bidang tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang G2G – pemerintah ingin memiliki prosedur elektronik; memperluas penggunaan informasi publik; dan

BPR berorientasi layanan. Pemerintah juga menetapkan 31 proyek sebagai bagian dari 10 agenda tersebut.

### Slide – page 13

Sebelum rencana lima tahun yang dikeluarkan pada tahun 2003,, pemerintah Republik Korea memiliki 11 inisiatif utama. Mereka juga terbagi dalam G2C, G2G dan G2B, yang intinya adalah tentang pemerintahan yang efisien dan transparan; layanan publik yang berkualitas; lingkungan bisnis yang baik; dan infrastruktur yang modern. Yang dimaksud dengan infrastruktur yang modern mencakup *e-signature, e-seal, e-certification, public key infrastructure* dan *e-documentation*.

Setelah anda selesai menyusun roadmap, anda memulai proses implementasi. Implementasi sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan, jika kita memiliki rencana yang matang, teknologi tersedia untuk mendukungnya.

Dalam kasus Meksiko, mereka memiliki rencana yang bagus, tetapi masalah mereka terletak pada pendanaan. Anda harus memiliki anggaran yang cukup. Anda boleh saja memiliki rencana yang ambisius, tetapi cara anda mengeksekusi rencana tersebut bergantung pada alokasi anggaran yang ada.

### Slide – page 14

Komite Khusus untuk e-government di bawah Presiden telah menetapkan 11 inisiatif utama di tahun 2001. Komite tersebut merupakan komite gabungan dari sektor publik dan sektor swasta.

Prinsip dan strategi yang digunakan adalah mengidentifikasi inisiatif dengan hasil tinggi yang dapat dibangun sampai akhir 2002; mencegah aktivitas yang redundan dan saling tumpang tindih; dan lebih fokus pada inisiatif lintas lembaga.

Ketika anda mengintegrasikan setiap departemen, jelas anda perlu untuk menghilangkan aktivitas yang redundan dan saling tumpang tindih. Karena tiap lembaga dan departemen memiliki inisiatif tersendiri, mereka perlu digabungkan. Dan untuk menggabungkan lembaga dan departemen tersebut, anda harus mendapatkan ijin dari mereka. Memang ini sangat sulit, tetapi perlu anda lakukan.



**Slide – page 15**

Berikut ini daftar 11 inisiatif utama dari *e-government*. Dalam rangka menciptakan layanan yang lebih baik dan inovatif untuk publik dan kalangan bisnis, inisiatif yang diusulkan adalah layanan asuransi terintegrasi, layanan pajak bumi dan bangunan, sistem pengadaan elektronik terintegrasi, dan layanan portal G4C – *Government for Citizen*. Portal G4C mencakup lima layanan yaitu kependudukan, *real estate*, kendaraan, pajak dan perusahaan, serta layanan asuransi yang terintegrasi.

**Slide – page 16**

Untuk produktivitas dan efisiensi pemerintah, inisiatif yang diusulkan adalah Sistem Informasi Keuangan Nasional, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Pendidikan Nasional, Sistem Pendukung Kebijakan Personel dan Pertukaran Dokumen Elektronik Pemerintah.

**Slide – page 17**

Kelompok ketiga adalah pengembangan infrastruktur yang modern bagi *e-government* yang mencakup *e-signature*, *e-seal* dan konsolidasi sistem informasi pemerintah. Berkaca dari pengalaman di Afghanistan yang juga ingin membangun sistem *e-government*. Salah satu hal yang mereka rencanakan adalah menetapkan infrastruktur untuk *e-certificate*, *e-seal*, *public key infrastructure*, dan *e-signature* karena ketika anda melakukan pertukaran data elektronik antar lembaga pemerintah, anda perlu sistem tersebut untuk mengamankan pertukaran data.

**Slide – page 18**

Kita telah membicarakan tentang 11 inisiatif, dan berikut adalah 31 inisiatif rinci. Untuk setiap pekerjaan, harus ada program aplikasi dan alokasi anggaran. Selain itu, anda juga harus menetapkan rencana implementasi.

**Slide – page 19**

Sejauh ini kita telah membahas proses, inisiatif, dan roadmap perencanaan strategis. Selanjutnya, anda perlu rencana dan kajian implementasi yang baik. Tanpa masukan, kajian atau



evaluasi, anda tidak tahu apakah anda sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Kesuksesan implementasi *e-government* bergantung pada kinerja setiap kegiatan yang ada di roadmap *e-government*.

Salah satu yang menjadi tantangan adalah integrasi basis data dan piranti lunak. Sedangkan integrasi dari perangkat keras relatif lebih mudah.

#### Slide – page 20

Berikut adalah rencana implementasi dari tahun 2003 hingga 2007. Di tahun 2003, Pemerintah Republik Korea menetapkan program-program dan rencana rinci. Di tahun 2004, mereka membangun infrastruktur seperti jaringan dan piranti keras serta mereformasi sistem hukum. Tahun 2005, mereka memperbaharui proses dan layanan yang ada. Rangkaian proses ini – rencana, infrastruktur, peningkatan proses dan layanan dilakukan melalui proses inovasi, lalu, pada tahun 2007 seluruh basis data pemerintah dan sistem komputer telah tergabung.

#### Slide – page 21

Hasil penilaian terhadap *e-government* Republik Korea yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Korea menempati peringkat keenam dunia dengan total indeks komposit 0,8317. Survei dari PBB ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- Indeks Pengukuran *Web* (*Web Measure Index*)
- Indeks infrastruktur telekomunikasi (*Telecommunication Infrastructure Index*); dan
- Indeks *human capital* (*Human Capital Index*).

Indeks pengukuran *web* mengukur kehadiran *online* dari lembaga-lembaga pemerintah.

Indeks infrastruktur telekomunikasi menunjukkan kapasitas infrastruktur untuk menyampaikan layanan *e-government*.

Indeks *Human Capital* mengukur tingkat melek huruf dari orang dewasa.

#### Slide – page 22

Sekarang mari kita bahas tentang anggaran. Kita telah membahas *roadmap*, rencana dan kita membutuhkan anggaran untuk mendukungnya. Berbeda dengan anggaran biasa, anggaran TI seharusnya diperlakukan sebagai investasi. Biasanya anggaran pemerintah mengikuti siklus anggaran tahunan.



Anda mengalokasikan anggaran dan membelanjakan semua dalam satu tahun, lalu pada tahun berikutnya, anda mendapatkan anggaran baru lagi. Namun, anggaran TI lebih banyak bersifat anggaran tahun jamak. Banyak pemerintahan yang kurang dapat memahami karakteristik ini.

Seperti dapat dilihat di tabel, anggaran tradisional adalah pengeluaran satu tahunan, sedangkan anggaran TIK adalah investasi tahun jamak.

Anggaran tradisional dinilai dari kinerja program demi program, jika kinerjanya bagus, maka pemerintah akan memberi lebih banyak uang pada bagian itu. Investasi TIK lebih melihat pada kinerja yang lintas batas.

Anggaran tradisional berdasar pada analisis biaya dan manfaat, sementara investasi TIK berfokus tidak hanya pada aspek keuangan tetapi juga biaya dan manfaat non keuangan.

Sementara anggaran tradisional menekankan pada tingkatan usaha terhadap alur kerja yang ada, investasi TIK menekankan pada perubahan dalam alur kerja tersebut.

Anggaran tradisional adalah operasi yang berkelanjutan sedangkan investasi TIK adalah operasi penetapan.

Anggaran tradisional menekankan pada kendali, sementara investasi TIK itu inovatif.

Anda bisa lihat perbedaan aspek antara anggaran tradisional dan investasi TIK. Solusi yang mungkin adalah mengklasifikasikan anggaran sebagai belanja modal; menyetujuinya secara terpisah oleh kantor koordinasi *e-government*; mempromosikan kemitraan publik swasta (*Public Private Partnership*); mendapatkan pendanaan untuk inovasi; dan melakukan kajian biaya dan manfaat.

#### Slide – page 23

Berikut adalah contoh dari Program Dukungan Proyek TI Republik Korea tahun 1994 hingga 2003. Pemerintah menginvestasikan sekitar 438 juta dolar amerika pada 368 proyek. Terdapat empat kelompok proyek. Mereka menghabiskan 195 juta dolar untuk 11 inisiatif utama dan program kerja *roadmap*. 182 juta dolar dihabiskan untuk 223 buah proyek pembangunan sistem informasi logistik nasional. Untuk proyek TI di daerah, 13 juta dolar dibelanjakan untuk



membangun sistem informasi daerah. 48 juta dolar digunakan untuk membangun pembelajaran online dan perawatan kesehatan jarak jauh.

#### Slide – page 24

Gambar berikut menunjukkan total anggaran TI dan jumlah pembiayaan untuk *e-government*. Investasi *e-government* berkisar 20% dari keseluruhan anggaran TI.

#### Slide – page 25

Tabel berikut menunjukkan jumlah dan besar pendanaan dari proyek-proyek yang termasuk dalam *roadmap e-government*, kebijakan baru dan pengembangan TI daerah. Anda perlu memiliki seluruh anggaran untuk TI beserta rencana rinci pengalokasian anggaran untuk tiap proyek.

#### Slide – page 26

Tabel berikut menunjukkan rencana distribusi pendanaan TIK dari 2006 hingga 2010. Bidang yang dialokasikan mencakup penguatan industri TI, realisasi *e-government*, TIK untuk masyarakat dan menjembatani kesenjangan digital. Tabel ini menunjukkan alokasi anggaran TI yang berdasar pada rencana jangka panjang.

#### Slide – page 27

Berikut adalah sebuah latihan. Di negara berkembang, apakah benar *e-government* dipandang hanya menguntungkan kelas menengah dan atas pada negara-negara berkembang? Apakah anda setuju? Jika ya, langkah apa yang perlu diambil untuk membangun penerapan *e-government* yang bersifat inklusif, merangkul semua populasi? Hal ini menarik, apalagi di negara berkembang, satu alasan anda tidak mendapatkan dukungan yang kuat atau permintaan dari masyarakat adalah karena masyarakat miskin berpikir bahwa akses ke sistem komputer dan jaringan hanyalah milik kalangan orang kaya.



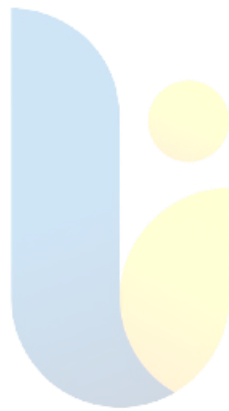


## DAFTAR PUSTAKA

Inpres No. 3 tahun 2003

Perpres No. 95 Tahun 2018

The Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT)



UNIVERSITAS  
INABA

